

**PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA,
IDEOLOGI NEGARA dan
PARADIGMA
PEMBANGUNAN NASIONAL**

**Pengajar :
SUHERMANTO**

HISTORIS PANCASILA

- Pertama kali disebut dalam pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI sebagai calon rumusan dasar negara, yang kemudian diberi nama Pancasila atas saran dari temannya.
- Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 45, dan rumusan Pancasila termuat dalam Pembukaan UUD 45, meskipun istilah Pancasila tidak dimuat dalam Pembukaan tersebut.
- Sejak itulah istilah Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia.



TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS

- Diharapkan mahasiswa mampu :
- menjelaskan dan memahami fungsi Pancasila dalam konstitusi negara, baik sebagai ideologi terbuka, dan sebagai pandangan hidup bangsa, serta Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional
 - menjelaskan perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi lainnya di dunia
 - Menjelaskan dan memahami hubungan negara dengan agama menurut Pancasila, paham theokrasi, paham liberalisme, dan paham komunisme
 - menjelaskan makna ideologi bagi suatu bangsa dan negara
 - memahami pentingnya revitalisasi Pancasila

ETIMOLOGIS PANCASILA

ETIMOLOGIS – Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta (kasta brahmana di India)

- *panca* artinya lima;
- *syila* artinya batu sendi, alas, dasar;
- atau *syiila* artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, yang sepantasnya.
- dalam bahasa Indonesia diartikan susila yang memiliki hubungan dengan moralitas
- **Pancasila** : lima aturan tingkah laku yang penting
- Menurut ajaran **budha**, Pancasila adalah lima aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh penganut biasa

HISTORIS RUMUSAN PANCASILA (1)

Muh. Yamin (29 Mei 1945) – rumusan pidato

Peri Kebangsaan

Peri Kemanusiaan

Peri Ketuhanan

Peri Kerakyatan

Kesejahteraan Rakyat

Rumusan tertulis mengenai rancangan UUD

Ketuhanan YME

Kebangsaan persatuan Indonesia

Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

HISTORIS RUMUSAN PANCASILA (2)

Ir. Soekarno (1 Juni 1945) – rumusan pidato Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau perikemanusiaan Mufakat atau demokrasi Kesejahteraan sosial
Lima Sila dapat difokuskan menjadi **Tri Sila** : Sosio Nasional – Nasionalisme dan Internasionalisme; Sosio Demokrasi - Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat Ketuhan Yang Maha Esa.
Tri Sila dapat diperas menjadi **Eka Sila**, yaitu Gotong-royong.

HISTORIS RUMUSAN PANCASILA (3)

Piagam Jakarta (22 Juni 1945) :

- Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

TERMINOLOGIS PANCASILA

TERMINOLOGIS - Perkembangan rumusan Pancasila:

- **UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945** :
Pembukaan dan batang tubuh (37 pasal, 1 Aturan Peralihan - 4 pasal & 2 aturan Tambahan - 2 ayat)
- **Pada Pembukaan tercantum rumusan Pancasila**:
Ketuhanan YME, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- **Dalam Konstitusi RIS (29/12/1949 – 17/8/1950)**:
Ketuhanan YME, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial
- **Dalam UUD Sementara (1950)**: Ketuhanan YME, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, Keadilan Sosial
- **Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat**:
Ketuhanan YME, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial.

ASAL MULA PANCASILA YANG LANGSUNG

- Berdasarkan Teori Kausalitas dibedakan atas 4:
- **Kausalitas Materialis** (asal usul bahan): nilai-nilai sbg unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia
- **Kausalitas Formalis** (asal usul bentuk): termuat dalam Pembukaan UUD 1945.
- **Kausalitas Efisien** (asal usul karya): Pancasila menjadi dasar negara yang sah melalui beberapa kali persidangan:
 - Sidang BPUPKI pertama
 - Sidang Panitia Sembilan → Piagam Jakarta.
 - Sidang BPUPKI kedua.
 - Sidang PPKI tidak resmi → sah sebagai ideologi
- **Kausalitas Finalis** (asal usul tujuan): pembahasan rumusan Pancasila dalam sidang-sidang pendiri

ASAL MULA PANCASILA YANG TIDAK LANGSUNG

- Asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu terdapat pada kepribadian dan pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia.
- Unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia
- Nilai-nilai tersebut merupakan pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religius, sebagai pedoman dalam mencari solusi permasalahan kehidupan

HAKEKAT PELAKSANAAN PANCASILA

DIGAMBARAKAN SEBAGAI Tri Prakarsa

- ❖ Pancasila sebagai azas KEBUDAYAAN – unsur Pancasila yang sudah dimiliki sebagai azas dalam adat-istiadat dan kebudayaan dalam arti luas
- ❖ Pancasila sebagai azas RELIGIUS – unsur Pancasila yang sudah dimiliki sebagai azas dalam agama
- ❖ Pancasila sebagai azas KENEGARAAN – rumusan Pancasila disahkan sebagai dasar negara

PANCASILA PANDANGAN HIDUP BANGSA

- ☀ Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri
- ☀ Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia, masyarakat dan alam sekitarnya
- ☀ Dalam kehidupan bersama dalam suatu negara perlu suatu tekad kebersamaan, cita-cita yang ingin dicapai yang bersumber pada pandangan hidupnya

Perumusan pandangan hidup masyarakat dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup negara, yang selanjutnya disebut sebagai ideologi bangsa atau ideologi negara

PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau negara : Pancasila ikut masuk dalam negara
 - **Negara memiliki cita-cita**, yaitu kebenaran yang hakiki yang dimiliki Pancasila
2. Kebenaran yang hakiki atau cita-cita harus diperjuangkan oleh negara
 - **menjadi muatan dalam UUD berdirinya negara**
3. Dalam UUD 1945, cita-cita tercermin dalam Pembukaan
 - **Pancasila merupakan ideologi negara**

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia → azas kerokhanian tertib hukum Indonesia dlm Pembukaan UUD 1945 (4 pokok pikiran)
2. Meliputi suasana kebatinan dari UUD 45
3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik yang tertulis (UUD) dan tidak tertulis
4. Mengandung norma yang mengharuskan UUD 45 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur
5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 45, bagi penyelenggara negara & pemerintahan

BUKTI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

- Pancasila sbg sumber dari segala sumber hukum
 - ✓ tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu
 - ✓ Pembukaan UUD 1945
 - ✓ Dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran,
 - ✓ Dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945
 - ✓ Hukum positif lainnya
- Dasar formal kedudukan Pancasila sbg dasar negara
 - ✓ Tersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV
 - ✓ Dalam kalimat terakhir Pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata "Pancasila"
 - ✓ Pengertian kalimatdengan berdasar kepada..., bermakna dasar negara adalah Pancasila.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA (1)

- ❏ Secara harfiah ideologi berarti pengertian dasar, gagasan dan cita-cita
- ❏ Secara umum : kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, menyangkut bidang politik, hankam, sosial, kebudayaan, dan keagamaan
- ❏ Pancasila sebagai ideologi negara pada dasarnya merupakan azas kerokhanian, dengan ciri-ciri:
 - ❏ Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
 - ❏ Mewujudkan suatu azas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus, diperjuangkan & dipertahankan dg kesediaan berkorban

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA (2)

Ideologi tertutup - ciri-ciri :

- ❑ membenarkan pengorbanan yang membebaskan rakyat;
- ❑ isinya bukan hanya nilai dan cita-cita tertentu, melainkan intinya terdiri dari tuntutan konkrit dan operasional yang diajukan secara mutlak
- ❑ bersifat totaliter dan menyangkut segala segi kehidupan

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA (3)

Ideologi terbuka - ciri-ciri :

- o nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat;
- o tidak diciptakan oleh negara tetapi digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri;
- o tidak hanya dibenarkan, tetapi dibutuhkan;
- o isinya tidak operasional, tetapi dapat dioperasionalkan dengan menjabarkan ke dalam perangkat konstitusi atau peraturan perundangan lainnya;
- o terbuka untuk proses reformasi dalam bidang kenegaraan, karena berasal dari masyarakat dan bersifat dinamis

NILAI - NILAI PANCASILA

- ✦ **NILAI DASAR** : esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal → cita-cita, tujuan nilai-nilai yang baik dan benar
- ✓ Nilai dasar Pancasila tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dan merupakan tertib hukum tertinggi serta berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental
- ✦ **NILAI INSTRUMENTAL** : penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, yang senantiasa dapat dilakukan perubahan
- ✦ **NILAI PRAKSIS** : penerapan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman, iptek, serta aspirasi masyarakat

DIMENSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

1. **DIMENSI IDEALISTIS:** nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Dimensi idealistis ini mampu memberikan harapan, serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-cita bersama.
2. **DIMENSI NORMATIF:** penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam suatu sistem norma, agar mampu dijabarkan dalam langkah operasional.
Dalam pengertian ini Pembukaan UUD 1945 merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara RI.
3. **DIMENSI REALISTIS:** nilai-nilai yang mampu dijabarkan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, sehingga mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

PERBANDINGAN PANCASILA - IDEOLOGI LAIN

- * **Ideologi Pancasila** : ideologi yang bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang, dan mendudukan manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan, sehingga nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral yang mengekspresikan kebebasan manusia
- * **Negara Pancasila** : bentuk suatu persekutuan hidup atau negara yang berdasarkan pada filsafat Pancasila, yaitu suatu Negara Persatuan, suatu Negara Kebangsaan, serta suatu Negara yang Bersifat integralistik
- * **Paham Negara Persatuan**
Negara persatuan: negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu satu negara, satu rakyat, satu wilayah, satu pemerintahan, satu tertib hukum, satu bahasa, dan satu bangsa
 - mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan
 - negara yang memiliki sifat persatuan bersama,
 - negara yang berdasarkan kekeluargaan, tolong-menolong atas dasar keadilan sosial

PERBANDINGAN PANCASILA - IDEOLOGI LAIN

* Bhinneka Tunggal Ika

Makna Bhinneka Tunggal Ika: meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa yang berbeda adat istiadat, kebudayaan, karakter, dan agamanya, serta terdiri atas beribu-ribu pulau, namun keseluruhannya adalah suatu persatuan bangsa dan negara Indonesia

* Paham Negara Kebangsaan

Paham kebangsaan: manusia membentuk suatu persekutuan hidup sebagai bangsa, yang hidup dalam suatu wilayah & memiliki tujuan tertentu → negara

* Hakekat Bangsa

Manusia membentuk suatu bangsa untuk memenuhi kodratnya sbg individu dan makhluk sosial → deklarasi bangsa Indonesia bukan didasarkan pd kemerdekaan individu seperti di negara liberal, ataupun manifestasi bangsa komunal seperti paham sosialis komunis

TEORI KEBANGSAAN (1)

Teori Kebangsaan: merupakan bahan perbandingan parapendiri negara untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki sifat dan karakter yang khas.

(1) TEORI HANS KOHN – bangsa terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan. Suatu bangsa tumbuh dan berkembang dari sifat-sifat khas yang telah berakar dalam masyarakat itu sendiri, yang terbentuk melalui suatu proses sejarah.

TEORI KEBANGSAAN (2)

- (2) TEORI KEBANGSAAN ERNEST RENAN – didasarkan pada kajian psikologi etnis, dikatakan bahwa bangsa adalah suatu jiwa, suatu azas kerokhanian. Beberapa pokok pikiran:
- (a) Bangsa adalah suatu jiwa, suatu azas kerokhanian
 - (b) Bangsa adalah suatu solidaritas yang besar
 - (c) Bangsa adalah suatu hasil sejarah, suatu azas kerokhanian
 - (d) Bangsa adalah bukan sesuatu yang abadi
 - (e) Wilayah dan Ras bukanlah suatu penyebab timbulnya bangsa. Wilayah memberikan ruang untuk hidupnya suatu bangsa, sedangkan manusia membentuk jiwanya.

TEORI KEBANGSAAN (3)

(3) **TEORI GEOPOLITIK OLEH FREDERIK RATZEL**
mengungkapkan hubungan antara wilayah geografi dengan bangsa : Negara merupakan suatu organisme yang hidup, yang memerlukan suatu ruangan untuk hidup.

(4) **NEGARA KEBANGSAAN PANCASILA**
Negara kebangsaan Pancasila adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, agama, serta berkedudukan dalam suatu ruang yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dan bersatu berdasarkan prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu Pancasila.

TEORI KEBANGSAAN (4)

FAKTOR PEMBENTUK JIWA BANGSA

- (a) Kejayaan dan kemuliaan di masa lampau
- (b) Suatu keinginan hidup bersama, baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang
- (c) Penderitaan-penderitaan bersama, yang merupakan modal sosial bagi pembentukan dan pembinaan paham kebangsaan persetujuan bersama di masa sekarang, yaitu musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama di masa sekarang yang mengandung hasrat keinginan hidup bersama berani memberikan pengorbanan pemungutan suara setiap hari, yang menjadi syarat mutlak bagi hidupnya suatu bangsa serta pembinaan bangsa.

FAKTOR PEMBENTUK JIWA BANGSA

Unsur-unsur Pembentuk nasionalisme Indonesia:

- (a) Kesatuan sejarah
- (b) Kesatuan nasib
- (c) Kesatuan kebudayaan
- (d) Kesatuan wilayah
- (e) Kesatuan azas kerokhanian

3. Paham Negara Integralistik

Paham integralistik memberikan suatu prinsip bahwa negara adalah suatu kesatuan integral dari unsur-unsur penyusunnya, negara mengatasi semua golongan bagian-bagian yang membentuk negara, negara tidak memihak pada suatu golongan. Negara dan bangsa adalah untuk semua unsur yang membentuk kesatuan

PAHAM NEGARA INTEGRALISTIK

Paham negara integralistik: keanekaragaman yang ada dipersatukan oleh azas kebersamaan, azas kekeluargaan serta azas religius dari Pancasila membentuk suatu kesatuan integral sebagai bangsa yang merdeka.

Hal ini dipertegas pada pokok pikiran pertama: "...Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas dan juga tidak mengenal tirani minoritas, sehingga di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, kekeluargaan, kebhineka-tunggal-ikaan, nilai religius serta selaras.

PANDANGAN INTEGRALISTIK (1)

1. Negara : suatu susunan masyarakat yang integral
2. Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya
3. Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis
4. Yang penting dalam kehidupan bersama adalah perhimpunan bangsa seluruhnya
5. Negara tidak memihak kepada suatu golongan atau perseorangan
6. Negara tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat
7. Negara tidak hanya untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan
8. Negara menjamin kepentingan manusia seluruhnya sebagai suatu kesatuan integral
9. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sbg suatu kesatuan yg tak dpt dipisahkan.

PANDANGAN INTEGRALISTIK (2)

1. Negara Pancasila adalah negara yang berketuhanan YME

Negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara, yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta religius. Pada hakekatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan YME, bukan negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara, dan bukan negara berdasarkan agama tertentu.

a. Hakekat Ketuhanan YME secara ilmiah filosofis mengandung makna : kesesuaian hubungan sebab-akibat antara Tuhan, Manusia dengan Negara. Manusia diciptakan Tuhan, dan manusia adalah makhluk Tuhan, sedangkan negara merupakan lembaga kemanusiaan/lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh manusia & tujuannya utk manusia.

PANDANGAN INTEGRALISTIK (3)

b. Hubungan negara dan agama

Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki hak dan kewajiban untuk menyembah Tuhan YME. Manifestasi hubungan manusia dengan Tuhannya terwujud dalam agama. Dalam hidup keagamaan manusia memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan pada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhannya, sedangkan dalam negara manusia memiliki hak dan kewajiban secara horizontal dalam hubungannya dengan manusia lain.

PANDANGAN INTEGRALISTIK (4)

- 1) Hubungan Negara dengan Agama menurut **Pancasila** tercantum pada pasal 29 (1), bahwa negara adalah berdasar atas Ketuhanan YME. Pasal 29 (2) memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan ketakwaan masing-masing.
- 2) Hubungan Negara dengan Agama menurut **Paham Theokrasi** bahwa antara negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, pemerintahan dijalankan berdasarkan firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara didasarkan atas firman tuhan. Dengan demikian terdapat negara theokrasi langsung dan negara theokrasi tidak langsung.

PANDANGAN INTEGRALISTIK (5)

- (3) Hubungan Negara dengan Agama menurut paham **Sekulerisme** dibedakan dan dipisahkan antara agama dan negara → bentuk, sistem, serta segala aspek kenegaraan tidak ada hubungannya dengan agama. Sekulerisme berpandangan bahwa negara adalah masalah keduniawian hubungan manusia dengan manusia, sedangkan agama menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya.
- (4) Hubungan negara dengan agama menurut paham **Liberalisme** didasarkan pada kebebasan individu. Negara merupakan alat atau sarana individu → masalah agama dalam negara sangat ditentukan oleh kebebasan individu. Disamping itu juga diberi kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan (Atheis), bahkan warganya diberi kebebasan untuk menilai dan mengkritik agama, karena kebenaran individu adalah sumber kebenaran tertinggi.

PANDANGAN INTEGRALISTIK (6)

(5) Hubungan negara dengan agama menurut paham Komunisme didasarkan pada pandangan filosofis materialisme dialektis dan materialisme historis, yaitu kenyataan tertinggi adalah materi. Namun materi menurut komunisme berada pada ketegangan internal secara dinamis bergerak dari keadaan (*tesis*) ke keadaan lain (*antitesis*), kemudian menyatukan (*sintesis*) ke tingkat yang lebih tinggi.

PANDANGAN INTEGRALISTIK (7)

5. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan nasionalisme dan hakekat kodrat manusia. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan suatu kebangsaan yang *chauvinistic*. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengakui dirinya sebagai bagian dari umat manusia, yang dalam tata pergaulan dunia internasional mengembangkan suatu pergaulan antar bangsa dalam masyarakat internasional berdasarkan atas kodrat manusia, serta mengakui kemerdekaan bangsa sebagai hak yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial.

PANDANGAN INTEGRALISTIK (8)

6. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan : kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat dan dalam sistem kenegaraan dilakukan oleh MPR.

- * negara *demokrasi monodualis*, artinya sebagai makhluk individu memiliki hak dan sebagai makhluk sosial harus disertai tanggungjawab.
- * Penggunaan hak-hak demokrasi harus disertai dengan (a) tanggung jawab kepada Tuhan YME, (b) menjunjung dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan (c) tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial, yaitu kesejahteraan dalam hidup bersama.

MAKNA IDEOLOGI BAGI BANGSA & NEGARA

1. Menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara sumber motivasi dan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara
2. Membimbing bangsa dan negara mencapai
 - Tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL

PANCASILA DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN (1)

- ✧ Ambruknya komunisme semakin memberikan keyakinan terhadap kebenaran Pancasila.
- ✧ Menurunnya kadar konflik yang berlatar belakang ideologi pada pasca perang dingin memberikan peluang pengembangan Pancasila sebagai dasar negara maupun ideologi nasional.
- ✧ Implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu diwaspadai, karena dapat mengarah pada kebebasan yang tidak terbatas/liberalisme.
- ✧ Kekhawatiran pengaruh paham liberal disebabkan pula oleh keberhasilan ekonomi negara maju, yang seolah-olah menyatakan rumusan paham liberal paling benar dan paling tepat untuk menjadi dasar pembangunan bangsa dan negara.

PANCASILA DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN (2)

- ✧ Pandangan global yang lebih mementingkan ekonomi mengurangi tekanan terhadap ideologi Pancasila.
- ✧ Kegiatan politik pemerintah serta peran LSM menyangkut isu HAM, Demokratisasi, dan Lingkungan hidup cenderung menjadi alternatif pilihan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya.
- ✧ Perkembangan LSM di masa ORBA sangat ditekan, karena LSM selalu mengkritik kebijakan pemerintah.

PENGERTIAN PARADIGMA (1)



Terminologi paradigma berkembang menjadi konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber azas, serta arah dan tujuan dari suatu bidang tertentu.



Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

PENGERTIAN PARADIGMA (2)



Pancasila adalah dasar negara, dan negara adalah organisasi manusia, maka dalam rangka mewujudkan tujuan nasionalnya melalui pembangunan nasional harus mengacu pada paradigma hakekat manusia monopluralis. Pembangunan nasional harus mencakup seluruh aspek unsur manusia monopluralis, yang dijabarkan dalam berbagai bidang pembangunan.

PANCASILA DALAM PARADIGMA BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN



Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek



Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik



Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi



Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya



Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan (hankam)

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN BIDANG IPTEK

- ♂ Iptek merupakan suatu hasil kreativitas rokhani manusia
- ♂ Unsur rokhani meliputi aspek akal, rasa dan kehendak
- ♂ Akal: potensi rokhani manusia yang berhubungan dengan intelektualitas; Rasa dalam bidang estetis; Kehendak dalam bidang moral (etika)
- ♂ Pengembangan iptek dimaksudkan untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan YME.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN BIDANG IPTEK

- Sila kesatu – iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya bagi manusia dan lingkungannya
- Sila kedua – iptek sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral, dikembangkan untuk tujuan kesejahteraan umat manusia dan peningkatan harkat dan martabat manusia.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN BIDANG IPTEK

- Sila ketiga – pengembangan iptek diarahkan untuk kesejahteraan umat manusia, termasuk didalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia.
- Sila keempat – pengembangan iptek secara terbuka dan demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, serta menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dalam mengembangkan iptek.
- Sila kelima – pengembangan iptek harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK

- ✧ Manusia adalah subyek negara
- ✧ Kehidupan politik dalam negara ditujukan untuk mencapai harkat dan martabat manusia, sesuai dengan HAM.
- ✧ Sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin HAM, dalam hal ini kekuasaan negara harus didasarkan pada kekuasaan rakyat bukan kekuasaan perorangan.
- ✧ Sila-sila Pancasila tersusun secara sistematis bahwa politik negara harus didasarkan pada kerakyatan, pengembangan dan aktualisasinya berdasarkan pada moralitas, yaitu moral ketuhanan (sila kesatu), moral kemanusiaan (sila kedua), dan moral persatuan (sila ketiga), serta pengembangan politik negara untuk tercapainya keadilan dalam hidup bersama (sila kelima)

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

- ✧ Pengembangan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan untuk kemanusiaan & kesejahteraan seluruh bangsa
- ✧ Negara Indonesia mengembangkan **ekonomi kerakyatan**, yaitu ekonomi yang humanistik yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat secara luas
- ✧ Pengembangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan **nilai-nilai moral kemanusiaan**, artinya pengembangan ekonomi adalah untuk kesejahteraan manusia, bukan dikembangkan untuk monopoli, persaingan bebas, atau lainnya yang menyebabkan penderitaan dan penindasan pada manusia

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

- ✧ Pembangunan pengembangan bidang sosial budaya perlu didasarkan pada sistem nilai yang sesuai dengan nilai budaya masyarakat Indonesia
- ✧ Pada era reformasi saat ini pengembangan sosial budaya harus dapat mengangkat nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila, karena etika Pancasila bersifat humanistik (bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya).
- ✧ Dalam proses reformasi saat ini sering terlihat gejala masyarakat yang tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang beradab akibat benturan kepentingan politik, dan semakin meningkatnya fanatisme etnis di berbagai daerah, sehingga terjadinya kelumpuhan peradaban manusia.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN BIDANG HANKAM

- ✧ Pembangunan di bidang hankam ditujukan untuk tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara
- ✧ Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas hankam negara, terutama untuk menjamin HAM tidak dilanggar
- ✧ Pengembangan hankam harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila agar tidak menjadi totaliter dan otoriter
- ✧ Pengembangan hankam didasarkan pada tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan masyarakat (sila kesatu dan kedua), untuk kepentingan seluruh warga negara (sila ketiga), mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila keempat), agar dapat diwujudkan keadilan dalam hidup masyarakat (sila kelima).

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERAGAMA

- ✧ Maraknya konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama antisipasi masalah agama
- ✧ Upaya berat bangsa Indonesia adalah mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab
- ✧ Ditegaskan dalam pokok pikiran keempat dari Pembukaan UUD 1945 bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab" → kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai ketuhanan, diberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama & menjalankan ibadahnya masing-masing.
- ✧ → negara Indonesia memberikan kebebasan atas kehidupan beragama & menjamin demokrasi di bidang agama

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI

- ✧ Keterpurukan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek → kondisi negara semakin memprihatinkan → perlu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara utk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, yang bermartabat kemanusiaan, yang menghargai HAM, masyarakat demokratis yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab
- ✧ Reformasi harus dilakukan dalam suatu sistem negara di bawah nilai-nilai Pancasila, bukan menghancurkan dan membubarkan NKRI.
- ✧ Proses reformasi tetap harus memiliki kerangka dasar dan sumber nilai yang jelas → arah, tujuan, cita-cita nasional, yaitu nilai-nilai Pancasila.
- ✧ Hakekat reformasi: mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan kerangka dasar kehidupan bersama bangsa Indonesia

WUJUD PANCASILA DALAM PARADIGMA REFORMASI (1)

- ✧ Di era reformasi: Pancasila sebagai dasar negara tidak dipermasalahkan, demokrasi yang menjadi ciri utama era reformasi menilai pelaksanaan P-4 bersifat indoktrinatif dan penjabarannya dinilai tidak berhasil dan tidak sesuai lagi dengan jamannya
- ✧ Banyak tatanan politik yang berubah dan berbagai paradigma baru muncul. Bersamaan dengan itu dalam Pemilu 1999 muncul 48 partai politik dengan ciri-ciri sebagai berikut: 35 parpol PS, 9 parpol Islam, 2 parpol Islam & PS, 1 parpol Demokrasi religius, dan 1 parpol demokrasi kerakyatan
- ✧ Sekitar 80% suara diberikan kepada partai politik berasaskan Pancasila (hasil Pemilu 1999)
- ✧ Pemilu 2004 memunculkan 24 partai dengan ciri-ciri: 16 parpol berdasarkan PS, 6 parpol agama, dan 2 parpol Marhaenisme

WUJUD PANCASILA DALAM PARADIGMA REFORMASI (2)

- ⌘ Walaupun parpol berasaskan demokrasi kerakyatan tidak berhasil ikut, tetapi dalam kenyataannya perjuangan para simpatisannya cukup berhasil, seperti : dipulihkannya hak-hak politik para mantan G30S/PKI melalui Keputusan MK, dan ikrar damai Forum Silaturahmi Anak Bangsa.
- ⌘ UU RI NO. 27 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, *a.l. berisi ancaman penjara 15 tahun bagi yang mengembangkan dan menyebarkan ajaran Komunisme/Maxisme-Leninisme, serta ancaman maks 20 tahun bagi yang berusaha meniadakan atau mengganti Pancasila.*

WUJUD PANCASILA DALAM PARADIGMA REFORMASI (3)

- ✧ Peran LSM mendapat posisi yang lebih strategis, yaitu pemberdaya masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai cara. Diantaranya: advokasi, pendampingan, penelitian, dan kegiatan pembangunan langsung di lapangan.
- ✧ Peran LSM berkembang pesat dan diakui dunia internasional, serta menjadi penyeimbang yang dapat berperan lebih besar dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memonitor pelaksanaan pembangunan.

WUJUD PANCASILA DALAM PARADIGMA REFORMASI (4)

- ⚡ Munculnya berbagai konflik sosial dan konsepsi yang mengarah pada disintegrasi bangsa, Seperti: Aceh, Irian Jaya, Riau; usulan diubahnya NKRI menjadi Negara Federal; Pemberlakuan syariat Islam di Aceh, dll.
- ⚡ Berbagai tuntutan yang timbul di era reformasi mendorong untuk lebih ditingkatkan aktualisasi Pancasila sbg ideologi terbuka.
- ⚡ Cepatnya perubahan-perubahan politik di era reformasi menunjukkan makin berkembangnya demokrasi di Indonesia.

GERAKAN REFORMASI & IDEOLOGI PANCASILA

Kondisi persyaratan reformasi yang diperlukan :

- (1) Gerakan dilakukan karena adanya penyimpangan
- (2) Gerakan dilakukan harus dengan cita-cita yang jelas → Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia
- (3) Gerakan dilakukan berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu sebagai kerangka acuan reformasi
- (4) Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi yang lebih baik.
- (5) Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berKetuhanan YME, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

PANCASILA SBG DASAR CITA-CITA REFORMASI

- Fenomena sejarah : adanya penyimpangan dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa perlu diantisipasi agar tidak terulang
- Gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi → tanpa dasar nilai yang jelas, suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi

PANCASILA SBG DASAR CITA-CITA REFORMASI

- Gerakan reformasi harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan
- Gerakan Reformasi harus dijiwai nilai-nilai luhur, nilai-nilai kemanusiaan, azas kebersamaan sebagai bangsa Indonesia, dapat mengembalikan tatanan pemerintahan negara yang benar-benar bersifat demokratis, dan mencapai visi dasar reformasi untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial

Revitalisasi dan Revalidasi Pancasila

BACK TO BASIC : tergantung ETIKA, MORAL dan MENTAL MANUSIA Sebagai SUBYEK



ANCAMAN TERHADAP PANCASILA

SUMBERNYA : KELEMAHAN DALAM PENGEMBANGAN, PENJABARAN, DAN IMPLEMENTASI

SECARA KONSTITUSIONAL:

- Mengganti PS dg ideologi lain
- Menciptakan berbagai Peraturan Per-UU-an yg tdk mengacu pd PS
- Nilai-nilai PS tdk diaktualisasikan
- Mengaburkan arti PS
- Mengemas hal-hal yg seolah-olah menjunjung tinggi HAM, demokrasi & keterbukaan pdhal bertentangan dg PS
- Manipulasi PS

SECARA INSKONSTITUSIONAL, melalui pendekatan:

- Ideologi → Berbagai asas Parpol, memperoleh kekuasaan politik melalui subversi, pengembangan ideologi lain
- Tekanan ekonomi
- Sosial Budaya dalam kondisi krisis multidimensional
- Hankam (huru hara, kekerasan)

ANCAMAN FAKTUAL TERHADAP PANCASILA

1. KOMUNISME

- Ajaran bersifat atheis (berdasarkan kebendaan)
- Menganut paham internasionalisme (~masyarakat komunis dunia tidak dibatasi oleh kesadaran nasional)
- Membangun negara berdasarkan kelas (merombak kapitalisme oleh kaum proletar)

2. LIBERALISME/KAPITALISME

(paham individualisme: hak & kebebasan individu)

3. IDEOLOGI AGAMA (bdsr kaidah agama tertentu)

4. FASISME/MILITARISME (mendambakan neg yg kuat dg pemusatan kekuatan tunggal dg cara membangun nasionalisme eksklusif, dan mengandalkan kekuatan militer yg menganggap rendah harkat & martabat, serta HAM)

5. PRIMORDIALISME (berwawasan sempit & isolatif)

6. PRAGMATISME (orientasi dibedakan dg cara pikir pragmatis, yaitu sikap & wawasan)

UPAYA MEWASPADAI ANCAMAN TERHADAP PANCASILA (1)

1. PENANGGULANGAN KELEMAHAN PANCASILA :
 - a. Pengembangan nilai-nilai dasar melalui jalur ideal normatif, atau jalur aktual empiris.
 - pengembangan cara-cara yg sesuai dengan paradigma baru
 - pengembangan dengan melibatkan semua pihak untuk menjaga obyektivitasnya
 - b. Penjabaran : harus konsisten dg nilai-nilai dasarnya, mampu menjawab tantangan jaman, revisi UU yang tidak sesuai dengan PS
 - c. Implementasi: kontrol penyimpangan secara ketat, kembangkan keterbukaan, tegakkan hukum, serta peraturan yang berlaku.

UPAYA MEWASPADAI ANCAMAN TERHADAP PANCASILA (2)

2. PENANGGULANGAN ANCAMAN FAKTUAL

a. Komunisme

- Pemasyarakatan secara luas tentang adanya pertentangan mendasar antara Komunisme & PS
- Pemantauan secara berlanjut perkembangan ajaran ideologi komunis dan kegiatan negara-negara komunis yg berpeluang membangkitkan paham komunis
- Tindakan tegas thd pemanfaatan peluang oleh pengikutnya
- Optimalisasi kultur politik yang berdasarkan Pancasila

UPAYA MEWASPADAI ANCAMAN TERHADAP PANCASILA (3)

b. Liberalisme

- Peningkatan kesadaran bahwa NKRI berdasarkan PANCASILA
- Peningkatan kesadaran dan rasa tanggung jawab tentang HAM
- Aktualisasi Politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi

c. Ideologi Agama

- Peningkatan kesadaran bangsa majemuk
- Membina kerukunan antar umat beragama
- Meningkatkan ketaatan hukum, moral, etika dan agama.
- Peningkatan pemahaman Pancasila sbg pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional

UPAYA MEWASPADAI ANCAMAN TERHADAP PANCASILA (4)

d. Fasisme/Militerisme

- Perlu kesadaran bersama antar komponen bangsa bahwa hanya TNI & POLRI sebagai kekuatan bersenjata resmi
- Meningkatkan kesadaran berdemokrasi Pancasila
- Mempertebal rasa kesatuan dan Persatuan
- Memasyarakatkan hakekat TNI bahwa TNI dari, oleh dan untuk rakyat

UPAYA MEWASPADAI ANCAMAN TERHADAP PANCASILA (5)

e. Primordialisme

- Meningkatkan kesadaran kemajemukan Indonesia
- Meminimalkan berbagai masalah SARA
- Mempercepat tercapainya keadilan sosial bagi rakyat

f. Pragmatisme

- Meningkatkan pemahaman thd ajaran agama
- Meningkatkan moral dan etika masyarakat
- Meningkatkan pemahaman Pancasila
- Meningkatkan pentingnya persatuan dan kesatuan
- Meningkatkan kesadaran untuk mendahulukan kepentingan umum

AGENDA REFORMASI NASIONAL

TAP No. VIII/MPR/1998; *Tujuan Reformasi*

1. **Mengatasi Krisis Ekonomi** dalam waktu sesingkat-singkatnya terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional
2. **Mewujudkan Kedaulatan Rakyat** dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional
3. **Menegakkan Hukum** berdasarkan nilai-nilai keberanaran dan keadilan, HAM menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental
4. **Meletakkan Dasar-dasar Kerangka dan Agenda Reformasi** pembangunan, **Agama dan Sosial Budaya** dalam usaha mewujudkan **Masyarakat Madani**

TANTANGAN DAN MASALAH FUNDAMENTAL ABAD 21

1. AWAL MILLENIUM III DITANDAI DENGAN DINAMIKA LIBERALISASI YANG MEMUNCIAK, KITA ALAMI DALAM FENOMENA REFORMASI DENGAN BERBAGAI DAMPAK YANG CUKUP MEMPRIHATINKAN
2. GEJOLAK REFORMASI MELAHIRKAN FENOMENA YANG MENGANDUNG KECENDERUNGAN SEBAGAI MASALAH FUNDAMENTAL, YANG MENUNTUT ALTERNATIF PEMECAHAN.
3. DINAMIKA LIBERALISASI GLOBAL DAPAT MEMACU MASALAH FUNDAMENTAL SEBAGAI TANTANGAN DAN ANCAMAN ATAS INTEGRITAS NKRI.

MASALAH FUNDAMENTAL DINAMIKA GLOBAL- KONDISI NASIONAL

1. FENOMENA PASCAMODERNISME & LIBERALISASI GLOBAL ditandai dengan Anarchisme politik dunia, berwujud TERORISME & GRK ANTI-TERORISME oleh USA & SEKUTU ~ Neo-imperialisme
2. POLITIK LIBERALISASI EKONOMI DUNIA DENGAN MENDEWAKAN EKONOMI PASAR, KEHARMONISAN & KESEIMBANGAN ANTARA NEGARA INDUSTRI (ADIDAYA) DENGAN NON-INDUSTRI MENJADI TANTANGAN & ANCAMAN → POLITIK SUPREMASI DARI NEGARA ADIDAYA MELENGKAPI NEO-IMPERIALISME.
3. DINAMIKA LIBERALISASI GLOBAL DAPAT MEMACU MASALAH FUNDAMENTAL SEBAGAI TANTANGAN DAN ANCAMAN ATAS INTEGRITAS NKRI.

INTEGRASI NASIONAL PERLU DIPUPUK DAN DIBINA DARI GENERASI KE GENERASI ?

1. BANGSA INDONESIA SANGAT HETEROGEN (SUKU, ETNIS, AGAMA, ADAT ISTIADAT)
2. KEPULAUAN YANG LUAS ➡ INFRA STRUKTUR PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KURANG ➡ BANYAK REMOTE AREA
3. PEMAHAMAN TENTANG KE INDONESIAAN RELATIF MASIH BARU
4. NKRI MERUPAKAN WILAYAH STRATEGIS BAGI KEPENTINGAN NEGARA BESAR/MAJU



INTEGRASI BANGSA ADALAH MASALAH STRATEGIS DAN KOMPLEKS

- ⇒ PERLU METODA PEMECAHAN SECARA
KOMPREHENSIF INTEGRAL
- ⇒ IMPLEMENTASI KONSEPSI
KETAHANAN NASIONAL)

PRASYARAT BAGI TERWUJUDNYA INTEGRASI BANGSA

1. PEMAHAMAN, KESADARAN, SERTA TEKAD BERSATU SEBAGAI BANGSA INDONESIA DALAM WADAH NKRI BERLANDASKAN PANCASILA
2. PEMAHAMAN, KESADARAN, DAN KESEPAKATAN TENTANG CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONAL DALAM PEMBUKAAN UUD 1945, SERTA KEPENTINGAN NASIONAL
3. KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN YANG BERKEADILAN DI SELURUH WILAYAH TANAH AIR

FAKTOR BERPENGARUH

KENDALA

1. Ideologi non pancasila (ideologi agama, sosialis / komunis, ideologi liberal, kapitalis)
2. Kepentingan pribadi, kelompok, organisasi, daerah diwarnai primordialisme dan feodalisme
3. Krisis ekonomi belum pulih
4. Jumlah penganggur besar, kriminalitas meningkat, rasa kebangsaan merosot.
5. Gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata belum dapat ditumpas. Pemerintah menghadapi minimal 3 front : militer, politik dalam negeri termasuk dukungan rakyat, dan diplomasi.

PELUANG

1. PANCASILA TETAP SBG DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL.
2. PARPOL & ORMAS DG PLATFORM PANCASILA.
3. POTENSI GEOGRAFI WILAYAH, KEKAYAAN ALAM, MODAL (DILUAR NEGERI), DAN SDM MASIH CUKUP BESAR.
4. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
5. TNI - SAPTA MARGA, SUMPAH PRAJURIT
POLRI - TRI BRATA
PNS - PANCA PRASETIA
6. WARGA BANGSA YG PATRIOT (SADAR BELA NEGARA). PERUNDANG-UNDANGAN SBG DASAR HUKUM UTK MENINDAK GOLONGAN SEPARATIS DAN SUBVERSI.

POKOK-POKOK PEMBINAAN INTEGRASI NASIONAL

1. JANGKA PENDEK

- TEGAKNYA KEDAULATAN NEGARA DI ACEH, PAPUA DAN MALUKU.
- KAMTIBMAS
- TEGAKNYA HUKUM DAN BERANTAS KKN
- MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- TERTATANYA KEHIDUPAN POLITIK YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN PANCASILA

2. JANGKA PANJANG

- INTEGRASI BANGSA MELALUI SISDIKNAS
- KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI EKONOMI KERAKYATAN
- GAKKUM DAN DISIPLIN NASIONAL
- KAMTIBMAS
- KEDAULATAN NKRI DI SELURUH NUSANTARA

STRATEGI

✉ KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG MEMILIKI :

- * INTEGRITAS MORAL YANG TINGGI
- * NASIONALISME YANG TINGGI
- * KEMAMPUAN NEGARAWAN YG DAPAT DIANDALKAN

✉ SDM MASYARAKAT

- * DISIPLIN YG TINGGI
- * PATRIOTISME YANG TINGGI

✉ INSTITUSI / KELEMBAGAAN

- * YANG MAMPU BERFUNGSI SECARA SINERGIK

**GUNA MENGELOLA DAN MEMANFAATKAN POTENSI
SKA, GEOGRAFI DAN DANA SECARA OPTIMAL**

Terima Kasih

